



**Mahkamah Syar'iyyah Lhokseumawe**



# Laporan Keuangan

## Unaudited Semester 2 Tahun 2024

---

**DIPA 005.01-2-401664-2024**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB**

Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua,  
Kota Lhokseumawe, Aceh.



0645-43925



ms-lhokseumawe.go.id



ms.lhokseumawe@gmail.com



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lhokseumawe, 31 Desember 2024

..... Pengguna Anggaran,



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-PoS Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	40
VI. Lampiran dan Daftar	41
Lampiran A1 Rincian Aset Per 31 Desember 2024	41
Lampiran Pendukung	42



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH**  
**MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE**

Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh  
Telp. (0645) 43925 fax. (0645) 41809  
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: [ms.lhokseumawe@gmail.com](mailto:ms.lhokseumawe@gmail.com)

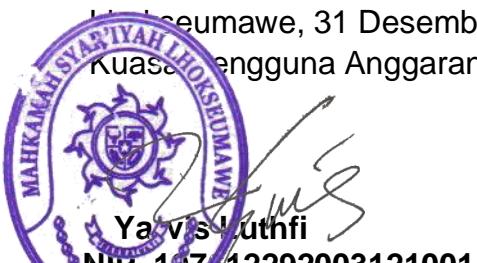
---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan ekuitas, dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lhokseumawe, 31 Desember 2024  
Kuasa Pengguna Anggaran,



Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Unaudited Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp830.000** atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp0**.

### **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar **Rp14.122.839.476** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp14.122.839.476** Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar **Rp12.437.000** Aset Tetap (neto) sebesar **Rp14.122.839.476** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp0**. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp12.437.000** dan **Rp.14.110.402.476**

### **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.0**, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp. (4.208.797.148)** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp4.208.797.148** Surplus Kegiatan Non Operasional **Rp. 830.000** Pendapatan pelepasan Aset **Rp. 830.000** dan surplus sebelum Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp4.207.967.148** dan sebesar **Rp0** sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar **Rp4.207.967.148**.

## **1. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar **Rp13.392.100.268** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp(4.207.967.148)** dikurangi dengan koreksi yang menambah/mengurangi nilai Ekuitas senilai **Rp1.187.446.630** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp.3.738.822.726**. sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp.14.110.402.476**

## **2. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode Unaudited yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Th. 2024					Th. 2023
	Catatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas (dibawah)	%	Realisasi
Pendapatan	B.1	-				
pendapatan PNBP	B.1	0	830.000	830.000	0	752.000
JUMLAH PENDAPATAN		0	830.000	830.000	0	752.000
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	2.406.650.000	2.368.977.766	(37.672.234)	98	2.150.986.190
Belanja Barang	B.4	1.349.465.000	1.343.194.960	(6.270.040)	100	1.463.147.838
Belanja Modal	B.5	0	0		0	238.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6					
JUMLAH BELANJA		3.756.115.000	3.712.172.726	(43.942.274)	99	3.852.134.028

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## II. NERACA

**MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.1</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.1.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.1.7	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	0	0
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	0	0
Persediaan	C.1.10	0	0
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		0	0
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	C.2.1	7.523.513.000	7.523.513.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	2.607.144.107	2.597.664.107
Gedung dan Bangunan	C.2.3	9.401.573.509	7.898.476.509
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	1.388.109	1.388.109
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5	(5.410.779.249)	(4.615.528.457)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		14.122.839.476	13.405.513.268
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.3</b>		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	4.700.000	4.700.000
Aset Lain-Lain	C.3.2	27.420.000	640.454.550
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(32.120.000)	(645.154.550)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		0	0
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>14.122.839.476</b>	<b>13.405.513.268</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.4</b>		
Uang Muka dari KPPN	C.4.1	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.2	12.437.000	13.413.000
Beban Yang Masih Harus Dibayar	C.4.4	0	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		12.437.000	13.413.000
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.5		
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		14.110.402.476	13.392.100.268
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>14.122.839.476</b>	<b>13.405.513.268</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	2024	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	90.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	2.368.001.766	2.152.229.440
Beban Persediaan	D.3	31.042.900	21.351.300
Beban Barang dan Jasa	D.4	902.929.261	1.045.377.431
Beban Pemeliharaan	D.5	358.375.799	345.537.250
Beban Perjalanan Dinas	D.6	50.847.000	50.850.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	497.600.422	474.250.230
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0	0
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>(4.208.797.148)</b>	<b>(4.189.595.651)</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>4.208.797.148</b>	<b>4.189.595.651</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		830.000	662.500
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
<b>JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11	<b>830.000</b>	<b>662.500</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>4.207.967.148</b>	<b>4.088.843.151</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan Luar Biasa	D.12	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>			
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>4.207.967.148</b>	<b>4.088.843.151</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	2024	2023
<b>EKUITAS AWAL</b>			
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-4.207.967.148	-4.088.843.151
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		1.187.446.630	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	1.187.446.630	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
<b>JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS</b>		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3.738.822.726	3.897.056.528
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		718.302.208	-191.786.623
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>14.110.402.476</b>	<b>13.392.100.268</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan Jalan Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.

- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

#### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Unaudited Semester II tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis  
Akuntansi*

#### **A.3. Basis Akuntansi**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

##### **Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

##### **Pendapatan -LRA**

###### **(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Pendapatan*

#### *-LO*

#### **(2) Pendapatan- LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

## Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perpendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### *Penyusutan*

#### *Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memperoleh alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp0**. Selama Tahun 2024 dilakukan revisi atas DIPA Awal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Selatan yang disebabkan adanya Refocussing, Penghematan belanja Pemerintah serta Relokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan termasuk penyelesaian pagu minus pegawai. Anggaran Awal dan Anggaran Revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

### Rincian Perubahan DIPA

Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan PNBP		
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang		
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan

Rp830.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2024 adalah sebesar **Rp830.000** atau mencapai **0** persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp830.000**. Rincian pendapatan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut:

**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan**  
**(dalam Rupiah)**

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	830.000	0,00
PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0,00
PENERIMAAN HIBAH	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami perubahan dibandingkan TA 2023 yang dapat dirinci sebagai berikut:

***Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023***  
***(dalam Rupiah)***

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	830.000	752.500	10,30
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan, Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00
Pendapatan Denda	0	0	0,00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>830.000</b>	<b>752.500</b>	<b>10,30</b>

## B.2. Belanja

### Realisasi Belanja

Negara.

Rp3.712.173.038

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp 3.712.173.038 atau 100,00% dari anggaran belanja sebesar Rp3.856.629.000 Rincian anggaran adalah sebagai berikut:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024**

***(dalam Rupiah)***

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.406.650.000	2.368.978.078	1,59
Belanja Barang	1.349.465.000	1.343.194.960	0,47
Belanja Modal			0,00
Belanja Bantuan Sosial		0	0,00
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>3.756.115.000</b>	<b>3.712.173.038</b>	<b>1,18</b>
Pengembalian	0		0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.756.115.000</b>	<b>3.712.173.038</b>	<b>1,18</b>

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Des 2024 mengalami **penurunan sebesar (43.942.274) (3,63)** persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Des 2023. Hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di belanja pegawai..

Perbandingan Realisasi Belanja  
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.368.977.766	2.150.986.190	10,13
Belanja Barang	1.343.194.960	1.463.147.838	(8,20)
Belanja Modal		238.000.000	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.712.172.726</b>	<b>3.852.134.028</b>	<b>(3,63)</b>

*Belanja Pegawai*

*Rp2.368.977.766*

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Des 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.368.977.766** dan **Rp2.150.986.190**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami Penurunan sebanyak 10,15 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain adanya mutasi pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai

TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.368.977.766	2.150.986.190	10,13%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	0,00%
Belanja Honorarium	-	-	0,00%
Belanja Lembur	-	-	0,00%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.368.977.766</b>	<b>2.150.986.190</b>	<b>10,13%</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	312	370.068	-100%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.368.977.454</b>	<b>2.150.616.122</b>	<b>10,15%</b>

#### **B.4 Belanja Barang**

*Belanja Barang*

**Rp1.343.194.960**

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Des 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp1.343.194.960** dan **Rp1.463.147.838** Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami **penurunan sebesar (8,20 %)** dari Realisasi Belanja Barang TA 2024 Hal ini disebabkan antara lain kurang optimalnya dalam pengajuan GU.

Perbandingan Belanja Barang  
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	666.134.390	938.188.560	(29,00)
Belanja Barang Non Operasional	-	9.344.000	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	42.829.705	33.804.400	26,70
Belanja Jasa	236.794.871	97.876.728	141,93
Belanja Pemeliharaan	346.588.994	333.084.150	4,05
Belanja Perjalanan Dinas	50.847.000	50.850.000	(0,01)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.343.194.960</b>	<b>1.463.147.838</b>	<b>(8,20)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.343.194.960</b>	<b>1.463.147.838</b>	<b>(8,20)</b>

*Belanja Modal Rp0*

#### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Des 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp238.000.000** Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 tidak mengalami Penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan 2023 disebabkan tidak adanya belanja modal dalam anggaran tahun 2024.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
TA 2024 dan TA 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	238.000.000	(100,00)
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>238.000.000</b>	<b>100,00</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>238.000.000</b>	<b>(100,00)</b>

*Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp0*

**B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar **Rp0** tidak mengalami kenaikan sebesar 40.83 persen bila dibandingkan dengan 2023 sebesar **Rp238.000.000**. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran belanja modal peralatan dan mesin selama TA 2024

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan  
Mesin  
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	238.000.000	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>238.000.000</b>	<b>(100,00)</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>238.000.000</b>	<b>(100,00)</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Aset Lancar

Aset Lancar  
Rp0

Jumlah Aset Lancar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, per 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

#### C. 1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2024 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
TA 2024 dan 2023*

*(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
BANK SYARIAH INDONESIA	0	0
Jumlah	0	0

#### C. 1. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara  
Penerimaan Rp0

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

*Aset Tetap*

*Rp14.122.839.476*

## C. 2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp14.122.839.476** dan **Rp14.405.513.268**. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

### C. 2. 1 Tanah

*Tanah*

*Rp7.523.513.000.*

Tanah yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp7.523.513.000** dan **Rp7.523.513.000**.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

#### Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2023	7.523.513.000
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi Kurang :	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Des 2024	7.523.513.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2024	-
Nilai Buku per 31 Des 2024	7.523.513.000

Rincian Saldo Tanah per 31 Des 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah TA 2024 (dalam rupiah)

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	700 m <sup>2</sup>	Jln Pinang Raya Desa Paya Punteut Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe	561.595.000
2	835 m <sup>2</sup>	Jln. Malahayati. No. 22 Simpang Empat Kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe	2.373.813.000
3	3059 m <sup>2</sup>	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua kota Lhokseumawe	4.588.105.000
4			
<b>Jumlah</b>			<b>7.523.513.000</b>

**C. 2. 2 Peralatan dan Mesin**

*Peralatan dan*

*Mesin*

*Rp2.607.144.107*

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp2.607.144.107** **Rp2.597.664.107**. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2023	2.948.467.657
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
<b>Saldo per 31 Des 2024</b>	<b>2.597.664.107</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2024	- 1.859.550.605
<b>Nilai Buku per 31 Des 2024</b>	<b>738.113.502</b>

**C. 2. 3 Gedung dan Bangunan**

*Gedung dan*

*Bangunan*

*Rp7.898.476.509*

Gedung dan Bangunan per 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp7.898.476.509** dan **Rp7.898.476.509**. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2023	7.898.476.509
Mutasi tambah :	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi Kurang	-
<b>Saldo per 31 Des 2024</b>	<b>7.898.476.509</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2024	- 2.755.977.852
<b>Nilai Buku per 31 Des 2024</b>	<b>5.142.498.657</b>

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Des 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

### C. 2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya  
Rp1.388.109

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp1.388.109** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut :

#### Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2023	1.388.109
Mutasi tambah :	
-	-
Mutasi Kurang	-
-	
Saldo per 31 Des 2024	1.388.109
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2024	-
Nilai Buku per 31 Des 2024	1.388.109

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

### C. 2.6 Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Rp-(4.615.528.457)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2024 dan 2023 masing – masing adalah sebesar **Rp(5.410.779.249)** dan **Rp(4.615.528.457)**

Akumulasi Penyusutan Aset merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain bentuk Tanah dan Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Des 2024 :

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
**(dalam rupiah)**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	(1.859.550.605)	(1.859.550.605)
2	Gedung dan Bangunan	-	(2.755.977.852)	(2.755.977.852)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	(4.615.528.457)	(4.615.528.457)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

### C.3.1. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud  
Rp 4.700.000*

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp4.700.000** dan **Rp4.700.000**

Aset Tak Berwujud merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak memiliki wujud fisik.

**Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud**  
**(dalam rupiah)**

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2023	11.520.000
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Saldo per 31 Des 2024	4.700.000
Amortisasi s.d 31 Des 2024	- 4.700.000
Nilai Buku per 31 Des 2024	-

**Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	Nilai
1	Sofware	4.700.000
2	-	
	Jumlah	4.700.000

### C.3.2. Aset Lain -lain

Aset Lain - lain

Rp27.420.000

Aset Lain - lain per tanggal 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp27.420.000** dan **Rp640.454.550** Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

#### Rincian Mutasi Aset Iain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Des 2023	7.631.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi kurang :	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Des 2024	27.420.000
Amortisasi s.d 31 Des 2024	27.420.000
Nilai Buku per 31 Des 2024	-

Rincian Aset Lain – lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya

Rp(640.454.550)

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp(640.454.550)** dan **Rp(640.454.550)**

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

#### Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset

#### Lainnya TA 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud	4.700.000	4.700.000	-
1	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
B	Aset Lain-lain	27.420.000	27.420.000	-
	Jumlah	-	-	-
	Total	11.520.000	19.151.000	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

#### C. 4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp12.437.000** dan **Rp13.413.000**

##### C. 4.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

##### C. 4.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp12.437.000** dan **Rp13.413.000** Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per tanggal pelaporan adalah

*Kewajiban Jangka Pendek*

*Rp12.437.000*

*Uang Muka dari KPPN Rp0*

*Utang kepada Pihak Ketiga*  
*Rp12.437.000*

sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Utang kepada Pihak Ketiga	12.437.000
2	Utang yang belum ditagih	-
3	Uang muka dari KPPN	-
	<b>Total</b>	<b>12.437.000</b>

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada **Treasury National Pooling (TNP)** dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan Uang Makan Pegawai bulan Juni yang belum dibayarkan kepada para pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

#### C. 4.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang Maih  
Harus Dibayar  
Rp12.437.000*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp12.437.000** dan **Rp13.413.000**, merupakan kewajiban pemerintah kepada Pihak Ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Belanja Pegawai yang Maih Harus Dibayar	12.437.000	13.413.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Uang Muka dari KPPN	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.437.000</b>	<b>13.413.000</b>

### C. 5. Ekuitas

*Ekuitas*

*Rp14.110.402.476*

Ekuitas per 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp14.110.402.476** dan **Rp13.392.100.268**. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp0

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0,00%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0,00%
Pendapatan Lain - lain	0	0	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yang merupakan belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

### D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp.  
2.368.978.078,-

Jumlah Beban Pegawai pada 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.368.978.078,-** dan **Rp2.150.986.190,-**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Rincian Beban Pegawai 2024 dan 2023**  
**(dalam rupiah)**

URAIAN	2024	2023	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2.368.977.766	2.150.986.190	10,13
Beban Tunjangan - Tunjangan	0	0	0,00
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0,00
Beban Lembur	0	0	0,00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>2.368.977.766</b>	<b>2.150.986.190</b>	<b>10,13</b>

### D.3 Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan  
Rp.42.829.705 , -*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp42.829.705** dan **Rp21.351.300**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan**

2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	42.829.705	21.351.300	100,60
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>42.829.705</b>	<b>21.351.300</b>	<b>100,60</b>

### D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan  
Jasa Rp945.758.966*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp945.758.966** dan **Rp1.045.377.431**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal

yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban – beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian asset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

#### Rincian Beban Barang dan Jasa

TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	608.541.796	846.972.560	(28,15)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	38.736.000	69.876.000	(44,56)
Beban Barang Non Operasional	42.829.705	9.344.000	100.00
Beban Belanja Operasional Covid 19	0	0	(100,00)
Beban Barang Operasional Lainnya	17.360.000	19.900.000	(12,76)
Beban Langganan Listrik dan Telpon	0	179.928	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	1.496.594	1.440.000	3,93
Beban Sewa	236.794.871	97.696.800	142,38
<b>Jumlah Beban</b>	<b>945.758.966</b>	<b>1.045.409.288</b>	<b>(9,53)</b>

#### D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp346.588.994,-*

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp346.588.994** dan **Rp345.537.250**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban Pemeliharaan

karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas asset – asset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

#### Rincian Beban Pemeliharaan

TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	202.000.000	200.000.000	(5.00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14.000.000	0	(100.00)
Beban Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	130.590.000	133.084.150	(12.00)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>346.588.994</b>	<b>333.084.150</b>	<b>(11.00)</b>

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp50.847.000,-*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp50.847.000** dan **Rp50.850.000**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan yang perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

## Rincian Beban Perjalanan Dinas

TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Biasa	50.847.000	50.850.000	(0,01)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>50.847.000</b>	<b>50.850.000</b>	<b>(0,01)</b>

## D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp497.600.422*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp497.600.422** dan **Rp474.250.230**. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Pos Luar Biasa  
Rp0*

## D.8 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban Pos Luar Biasa untuk Periode 31 Des 2024 dan 2023 Rp. 0.

*Surplus/Defisit LO  
Rp. 4.207.967.148*

## D.9 Surplus/ Defisit LO

Surplus/Defisit LO terdiri dari Kegiatan Operasional dan Non Operasional dan juga Pos Luar Biasa. Periode 31 Des 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp4.207.967.148** dan **Rp4.088.843.151**.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 13.392.100.268** dan **Rp13.583.886.891**

### E.2 Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah deficit sebesar **Rp(4.207.967.148)** dan **Rp(4.088.843.151)**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

### E. 3. 1 Selisih Revaluasi Aset

*Aset* Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp 0**.

### E. 3. 2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi* Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp1.187.446.630** dan **Rp (0)**.

### E. 4. 5 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-Lain* Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi

atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

### E. 5 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar*

*Entitas*

*Rp3.738.822.728*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Des2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp3.738.822.728** dan **Rp3.897.056.528**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditaghikan ke Entitas Lain	3.738.822.726
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
<b>Jumlah</b>	<b>3.738.822.726</b>

### E. 6. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir*

*Rp14.110.402.476*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2023 masing-masing Adalah sebesar **Rp14.110.402.476** dan **Rp13.392.100.268**.

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.**

### **F. 1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

### **F. 2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor. W1-A501/KP.07.6/9/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Yarvis Luthfi, S.H.
Pejabat Pembuat Komitmen	: -
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Abdul Mutualib, A.Md, S.H
Bendahara Pengeluaran	: Amirul Haq, S.H.I.
Operator	: Siti Mawaddah, S.Sos.I



Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Per 30 Desember 2024

---

---

**Laporan-laporan Pendukung**

**Telaah LK Unaudited Tahun 2024**

**Berita Acara Opname Fisik Persediaan Smester II Tahun 2024**

**Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal**

**Neraca Percobaan Akrual Per 30 Desember 2024**

**Neraca Percobaan Kas Per 30 Desember 2024**

**Laporan LRA Face Per 30 Desember 2024**

**Neraca Face Per 30 Desember 2024**

**Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun Per 30 Desember 2024**

**Laporan Operasional (LO) Per 30 Desember 2024**

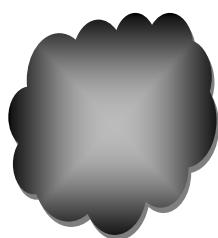
**Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Per 30 Desember 2024**

**Neraca Aset BMN Per 30 Desember 2024**

**Laporan Barang Kuasa Pengguna BMN 30 Desember 2024**

**Laporan Barang KPB Penyusutan BMN Per 30 Desember 2024**

**Neraca Persediaan 30 Desember 2024**



**LAMPIRAN A1**  
**MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB**  
**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024**

No	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
<b>A</b>	<b>Tanah</b>				
1	Tanah Persil	4.612	7.523.513.000 7.523.513.000	0 0	7.523.513.000 7.523.513.000
<b>B</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	336	<b>2.607.144.107</b>	<b>(2.043.273.868)</b>	<b>563.870.241</b>
1	Alat Angkutan Bermotor	6	384.875.117	(384.875.117)	0
2	Alat Kantor	25	122.335.450	(94.575.450)	27.760.000
3	Alat Rumah Tangga	222	764.051.120	(523.765.310)	240.285.810
4	Alat Studio	11	84.731.820	(57.890.910)	26.840.910
5	Alat Komunikasi	1	42.900.000	(42.900.000)	0
6	Peralatan Pemancar	2	297.340.000	(143.900.000)	153.654.286
7	Alat Kedokteran	1	1.500.000	(1.500.000)	0
8	Komputer Unit	50	667.950.510	(594.053.775)	73.896.735
9	Peralatan Komputer	18	241.460.090	(200.027.590)	41.432.500
10					
<b>C</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	4	<b>9.401.573.509</b>	<b>(3.367.505.383)</b>	<b>6.034.068.126</b>
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2	<b>9.075.479.509</b>	(3.303.144.719)	5.772.334.790
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2	326.094.000	(64.360.664)	261.733.336
<b>D</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>1.388.109</b>	<b>0</b>	<b>1.388.109</b>
1	Bahan Perpustakaan	473	1.388.109	0	1.388.109
<b>E</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah</b>	2	<b>20.000.000</b>	<b>(20.000.000)</b>	<b>0</b>
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	2	20.000.000	(20.000.000)	0
2	Alat Rumah Tangga	0	0	0	0
<b>F</b>	<b>KDP</b>	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>			<b>19.554.218.725</b>	<b>(5.431.379.249)</b>	<b>14.122.839.476</b>

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)  
SMESTER II TAHUN 2024**

Kode dan Nama UAKPA : (401664) KANTOR MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Kode dan Nama UAPPAW : (0600) MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Kode dan Nama Eselon 1 : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

<b>Objek Penelaahan</b>	<b>Kondisi LK</b>	<b>Seharusnya</b>
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>		
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1 Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2 Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V	Ada
3 Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
	V	
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1 Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	V	Ada
2 Neraca Percobaan Akrual	V	Ada
3 Neraca Percobaan Kas	V	Ada
4 Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V	Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI</b>		
<b>Kesesuaian Saldo</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>
1. Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
3 Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V	Sama
<b>PENGECEKAN PADA MONSAKTI</b>		
<b>To Do List</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
1 Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	V	Tidak
2 Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat)	V	Ya
3 Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan	V	Tidak
4 Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan	V	Tidak
5 Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan)	V	Tidak
6 Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan	V	Tidak
7 Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan	V	Tidak
8 Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan	V	Tidak
9 Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan)	V	Tidak
10 Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan	V	Tidak
11 Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan	V	Tidak
12 Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan	V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>		
<b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1 Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?	V	Tidak
2 Adakah "TDK COA" yang BEDA?	V	Tidak
3 Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?	V	Tidak
a. Pagu/DIPA	V	Tidak
b. Estimasi PNBP	V	Tidak
c. Belanja	V	Tidak
d. Pengembangan Belanja	V	Tidak
e. Pendapatan	V	Tidak
f. Pengembangan Belanja	V	Tidak
g. Kas BLU	V	Tidak
h. Kas di Bendahara Pengeluaran	V	Tidak

i. Kas Hibah		V	Tidak
j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
<b>Rekon Internal</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1 Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
<b>Daftar MONSAKTI</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1 Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal)		V	Tidak
2 Adakah akun "Belum Deregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum dregsiter')		V	Tidak
3 Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4 Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5 Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6 Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>			
<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3. Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1 Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		V	Ya
2 Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		V	Ya
3 Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)		V	Ya
4 Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)		V	Ya
5 Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)		V	Ya
6 Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		V	Ya
7 Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)		V	Ya
<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1 Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2 Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		V	Tidak
3 Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		V	Tidak
4 Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5 Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6 Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7 Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8 Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9 Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10 Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11 Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		V	Tidak
12 Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13 Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang		V	Tidak
<b>Jika Bukan Satker BLU</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1 Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2 Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3 Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4 Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
<b>Terkait Satker BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1 Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2 Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		V	Tidak
<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1 Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2 Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak

		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
	<b>Hibah Langsung</b>			
1	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke	V	Tidak	
2	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di	V	Tidak	
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	V	Tidak	
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	V	Tidak	
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	V	Tidak	
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	V	Tidak	
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	V	Tidak	
	<b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	V	Tidak	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	V	Tidak	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu	V	Tidak	
	<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada <b>Neraca Percobaan Kas?</b>	V	Tidak	
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	V	Tidak	
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada	V	Tidak	
	<b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	V	Tidak	
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat	V	Tidak	
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	<b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	V		Ya
	<b>PENGECEKAN NERACA</b>			
	<b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernali wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?	V	Tidak	
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernali desimal	V		Tidak
	<b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>			
	<b>Pengecekan Pos-pos LO</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)	V		Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-	V		Tidak
3	Terdapat kodefifikasi atau uraian akun null	V		Tidak
4	Seluruh akun bernali positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat	V		Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya
7	Apakah terdapat saldo bernali desimal?	V		Tidak
	<b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>			
	<b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	V		Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek	V		Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernali desimal?	V		Tidak

	<b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Tidak
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas	V		Tidak

**PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)**

	<b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat saldo negatif di LRAB	V		Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)	V		Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya	V		Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"	V		Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	V		Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan)	V		Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah	V		Tidak

**TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN**

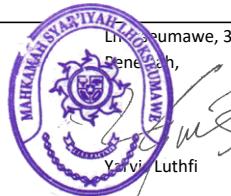
	<b>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	V		Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	V		Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	V		Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	V		Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	V		Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	V		Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	V		Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	V		Tidak
	<b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	V		Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	V		Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?	V		Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	V		Tidak
	<b>Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	V		Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	V		Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	V		Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual	V		Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	V		Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	V		Ya

**LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN**

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui  
Pejabat Penyusun LKKL,

  
IHKSAN



Lumajang, 30 Januari 2024

Dr. H.

Luthfi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH**  
**MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE**

Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh  
Telp. (0645) 43925 fax. (0645) 41809  
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email [ms.lhokseumawe@gmail.com](mailto:ms.lhokseumawe@gmail.com)

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN (01) MAHKAMAH**  
**SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE**  
**Nomor : 315/SEK.MS.W1-A5/PL1.2.1/12/2024**

Nama Satker : Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe  
Kode Satker : 401664  
UAPPB-W : Mahkamah Syar'iyah Aceh  
UAPPB-E1 : Direktorat Jenderal Badan Urusan Administrasi

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Yarvis Luthfi, SH  
NIP : 197612292003031001  
Jabatan : Kasub Umum dan Keuangan
2. Nama : Roslia, SH  
NIP : 197012201998032001  
Jabatan : Kasub Umum dan Keuangan
3. Nama : Siti Mawaddah, S.Sos.I  
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan **Stock Opname** barang persediaan Semester II Tahun 2024, dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik (**Stock Opname**).

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Barang Persediaan (Opname Fisik).

1. Abdul Mutalib, A.Md.,S.H. Plh. Kasubag Umum dan Keuangan

1.

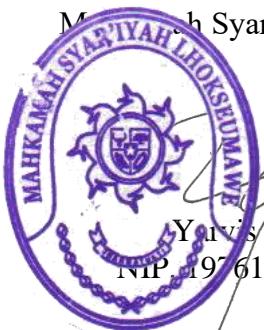
2. Siti Mawaadah, S.Sos.I Operator Persediaan

2.

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Barang

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



Yarvis Luthfi, S.H.  
NIP 197612292003031001